

## KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) merupakan instrument pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga hak dan wewenang daerah dalam mengelola otonomi tetap sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional dengan berpijak pada kepentingan nasional dimaksud. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban merupakan norma perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sehingga kedudukan dan peranan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban menjadi sangat penting dan menjadi salah satu kewajiban Kepala Daerah untuk dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini disusun sebagai bahan evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan Pemerintah Daerah.

Ba'a, 24 Januari 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Rote Ndao,



**Regina A. V. Kedoh, S.STP,M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19800827 199912 2 003

## **DAFTAR ISI**

<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>1</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Data Pegawai.....</b>	<b>5</b>
 <b>BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....</b>	 <b>9</b>
 <b>BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH</b>	 <b>18</b>
<b>3.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target</b>	
<b>Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.....</b>	<b>18</b>
<b>3.2 Realisasi Anggaran .....</b>	<b>21</b>
<b>3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah Yang Di Hadapi Serta Solusi Pemecahannya.....</b>	<b>27</b>
<b>3.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah di Tetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024.....</b>	<b>32</b>
<b>3.5 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan.....</b>	<b>33</b>
<b>3.6 Tindak Lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....</b>	<b>33</b>
 <b>BAB IV PENUTUP.....</b>	 <b>34</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Hukum**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Rote Ndao (lembaran daerah kabupaten rote ndao tahun 2016 nomor 005, tambahan lembaran daerah kabupaten rote ndao nomor 135). Peraturan Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

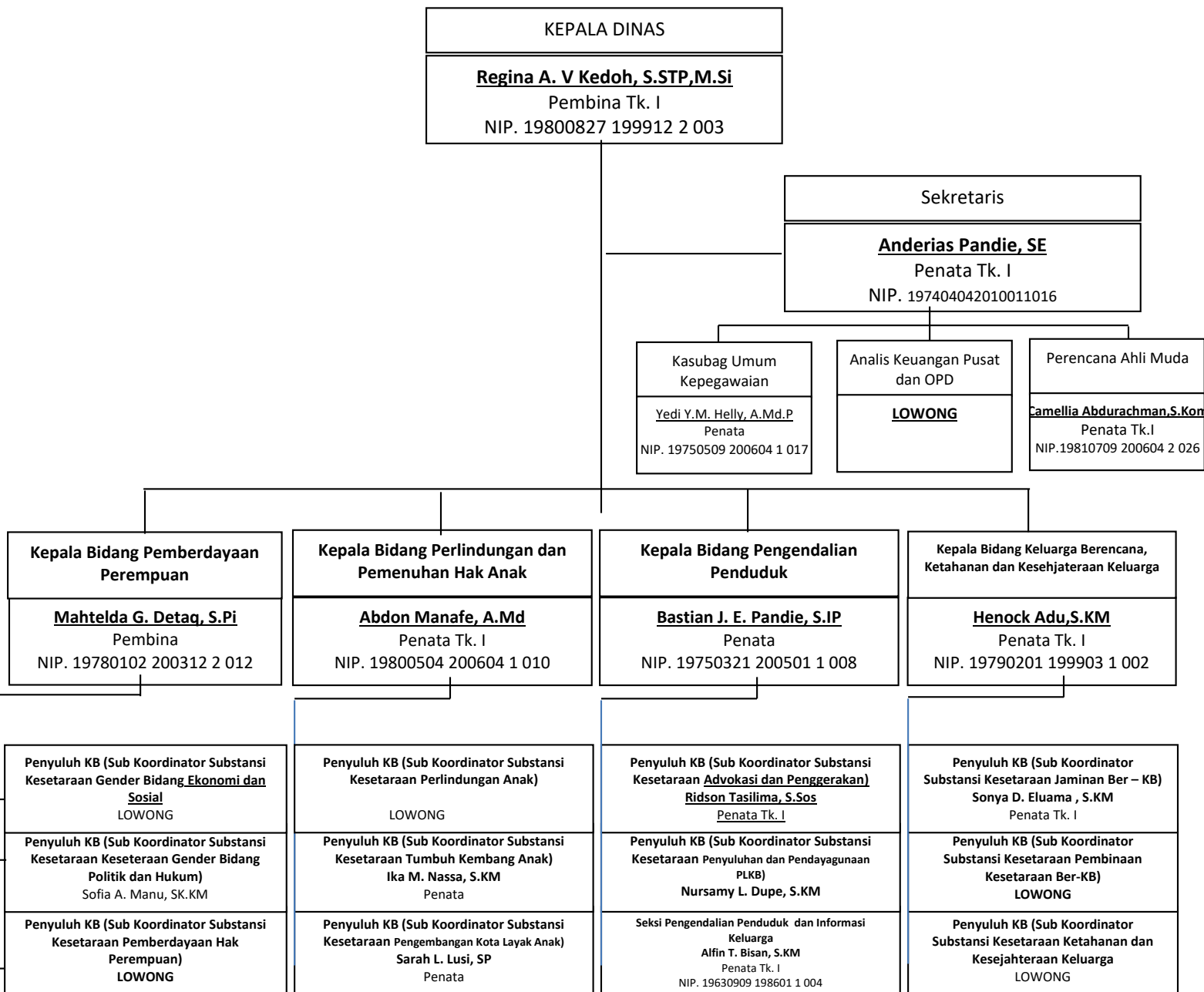
### **1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra dengan jumlah Pegawai, daftar aset dan anggaran sebagai berikut :

# 1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

## Bagan Struktur Organisasi 1.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016)



### 1.3 Data Pegawai

Daftar Nominatif Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan	Ket
1.	Regina A.V. Kedoh S.STP. M.Si/ NIP.198008271999122003	Pembina Tk. I/ IV.b	Kepala Dinas P3AP2KB	S2	
2.	Anderias Pandie, SE NIP. 197404042010011016	Pembina/IV. a	Sekretaris	S1	
3.	Abdon Manafe, A.Md NIP .198005042006041010	Penata Tk. I/IIId	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	D3	
4.	Bastian J. E. Pandie, S.IP NIP.197503212005011008	Penata/IIIC	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	S1	
5.	Mahtelda G. Detaq, S.Pi NIP.19780102 200312 2 012	Pembina/IV. a	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	S1	
6.	Henoch Adu, S.KM NIP .197902011999031002	Pembina/IV. a	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	S1	
7.	Yedi Y.M. Helly, A.Md. NIP .197505092006041017	Penata Tk.I /III-c	Kasubag Umum dan Kepegawaian	DIII	
8.	Ridson Tasilima,S.Sos NIP .197508182006041003	Penata Tk.I /III-d	Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda	S1	
9.	Alfin T. Bisan, S.KM NIP. 197904062000122002	Penata Tk.I /III-d	Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda	S1	
10.	Sofia A. Manu, S.KM NIP .198110112009042007	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB Ahli Muda	S1	
11.	Sonya D. Eluama, S.KM NIP .198110222009042009	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB Ahli Muda	S1	
12.	Camellia Abdurachman, S.Kom NIP.198107092006042026	Penata Tk.I /III-d	Perencana Ahli Muda	S1	

13.	Sarah L. Lusi, SP NIP.197303042005012009	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kota Layak Anak)	S1	
14.	Nursamy F. Dupe, S.KM NIP.198902042011012004	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB)	S1	
15.	Ike M. Nassa, S.KM NIP .198808202011012012	Penata Tk.I /III-d	Penyuluh KB (Sub Koordinator Substansi Tumbuh Kembang Anak)	S1	
16.	Porsenny J. Luik, SP NIP.19810620 201212 2 003	Penata Muda Tk.1 /III-b	Pelaksana	S1	
17.	Lexi A. Suek, SE NIP. 197108072006041020	Penata Muda/III-b	Pelaksana	S1	
18.	Mard Sony Rohi NIP.198003112006042026	Penata Muda/III-a	Pelaksana	SMA	
19.	Nindi E. Haning, S.KM NIP.199205152022032005	Penata Muda/III-a	Pelaksana	S1	
20.	Sumiyanti F. moy, A.Md.P NIP.199730052022032002	Pengatur/ II-c	Pelaksana	DIII	
21.	Emri I.M Dethan NIP .197504142003121004	Penata Muda / III-a	Pelaksana	SMA	
22.	Melky A.F. Thutaes NIP .197905312003121005	Penata Muda / III-a	Pelaksana	SMA	
23.	Yeni Suryani, A.Md NIP .1978090220122002	Penata Muda / III-a	Pelaksana	D3	
24.	Petrus Bolla NIP .197912112007011008	Pengatur Tk. I/II-d	Pelaksana	SMA	
25.	Beny Oktovianus Pello NIP .197605062007011011	Penata Muda/III-a	Pelaksana	SMA	
26.	Joel Timu NIP .198302152006041018	Penata Muda/III-a	Pelaksana	SMA	
27.	Amin Imanuel Faot, S.Sos NIP.19921225 202203 1 003	Penata Muda/ III-a	Fungsional Umum	S1	
28.	Teresa Diana Kebewa Makin, S.Pi NIP.19970111 202203 2 003	Penata Muda/ III-a	Fungsional Umum	S1	

Sumber Data : Des 2024

### 1.3.1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

<b>Jumlah Pejabat Struktural</b>	<b>Jumlah Pejabat Fungsional</b>	<b>Jumlah Fungsional Umum</b>	<b>Jumlah</b>
7 Orang	8 Orang	13 Orang	28 Jumlah

### 1.3.2 Jumlah PNS Berdasarkan Kepangkatan

<b>Golongan Kepangkatan</b>			
<b>Golongan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
I/a	-	-	0
I/b	-	-	0
I/c	-	-	0
I/d	-	-	0
II/a	-	-	0
II/b	-	-	0
II/c	-	1	1
II/d	-	-	0
III/a	6	4	10
III/b	1	1	2
III/c	1	-	1
III/d	3	7	10
IV/a	2	1	3
IV/b	-	1	1
IV/c	0	0	0
IV/d	0	0	0
<b>TOTAL</b>	12	16	28

### 1.3.3 Jumlah PNS Berdasarkan Pejabat Struktural

<b>Jumlah Pejabat Struktural</b>			
<b>Eselon</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
I-a	-	-	0
I-b	-	-	0
II-a	-	-	0
II-b	-	-	0

III-a	-	-	0
III-b	-	-	0
III-c	1	-	1
III-d	2	-	2
IV-a	2	1	3
IV-b	-	1	1
<b>TOTAL</b>	5	2	7

#### 1.3.4 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>Tingkat Pendidikan</b>			
<b>Jenjang</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
SD	-	-	0
SLTP	-	-	0
SLTA	5	2	7
D1	-	-	0
D2	-	-	0
D3	2	1	3
S1	6	11	17
S2	-	1	1
S3	-	-	0

#### 1.3.5 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan

<b>Nama Jabatan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Struktural	5	2	7
Fungsional Umum	7	6	13
Fungsional Tertentu	1	7	8
<b>TOTAL</b>	13	15	28



## BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

### DAERAH

Gambaran mengenai Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Alokasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula **Rp. 9.056.383.654,-** bertambah sebesar **Rp. 919.233.195,-** atau **1,10%** menjadi **Rp.9.975.616.849,-** dengan rincian :

- a. Belanja Operasi semula **Rp. 9.056.383.654,-** bertambah senilai **Rp. 919.233.195,-** atau **1,10%** menjadi **Rp. 9.975.616.849,-**
- b. Belanja Modal semula **Rp. 1.005.100.000,-** bertambah senilai **Rp. 22.498.000,-** atau **0.98%** menjadi **Rp. 1.027.499.000,-** dengan rincian :

TABEL 2.1

Perubahan Penjabaran Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN		
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>2.303.574.954</b>	<b>2.673.099.154</b>	<b>369.524.200</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1.930.036.654	2.300.261.054	370.224.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.828.036.654	2.198.261.054	370.224.400

2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	102.000.000,-	102.000.000,-	-
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	9.600.000,-	9.600.000,-	-
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.800.000,-	4.800.000,-	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.800.000,-	4.800.000,-	-
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	155.025.800,-	154.325.600	(700.200)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.000	4.995.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	30.000.000	30.000.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.996.800	19.296.600	(700.200)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.034.000	100.034.000	-
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	35.474.500	35.474.500	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	975.000	975.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.499.500	34.499.500	-
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	173.438.000	173.438.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	173.438.000	173.438.000	-
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN</b>	40.199.000	40.199.000	-

3.	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>			
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota</b>	20.199.000	20.199.000	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	20.199.000	20.199.000	-
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota</b>	20.000.000	20.000.000	-
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	20.000.000	20.000.000	-
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>305.000.000</b>	<b>305.000.000</b>	-
	<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota</b>	55.000.000	55.000.000	-
	Sub Kegiatan Koordinasi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	55.000.000	55.000.000	-
	<b>Kegiatan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota</b>	188.360.000	188.360.000	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	188.360.000	188.360.000	-

4	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	51.640.000	51.640.000	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	51.640.000	51.640.000	-
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten / kota	20.000.000	20.000.000	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	-
5.	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>373.928.000</b>	<b>373.928.000</b>	-
	<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/kota</b>	157.728.000	157.728.000	-
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan kabupaten/Kota	55.000.000	55.000.000	-
	Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	93.728.000	93.728.000	-
	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang</b>	150.800.000	150.800.000	

6.	<b>Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150.800.000	150.800.000	-
	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	64.400.000	64.400.000	-
	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	64.400.000	64.400.000	-
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>6.002.761.700</b>	<b>6.264.381.700</b>	<b>261.620.000</b>
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>239.399.900</b>	<b>289.399.900</b>	<b>50.000.000</b>
	<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	239.399.900	289.399.900	50.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	60.000.000	-
	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	89.400.000	89.400.000	-
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	89.999.900	139.999.900	50.000.000
7.	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>4.704.061.800</b>	<b>4.915.681.800</b>	<b>211.620.000</b>

<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal</b>	1.152.468.800	1.102.468.800	(50.00.000)
Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	226.468.700	226.468.700	-
Sub Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	21.500.100	21.500.100
Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	128.500.100	(21.500.000)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	150.000.000	150.000.000	-
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai Penyuluhan KKBPK	546.000.000	496.000.000	(50.000.000)
Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	80.000.000	-
<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	387.000.000	886.975.000	499.975.000
Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Pedesaan (IMP)	387.000.000	387.000.000	-
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-	499.975.000	499.975.000
<b>Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi</b>	2.519.013.000	2.019.738.000	(499.275.000)

	<b>serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota</b>			
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000	13.500.000	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1.055.266.000	1.055.266.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.017.975.000	518.700.000	(499.275.000)
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	15.800.000	15.800.000	-
	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	416.472.000	416.472.000	-
	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	645.580.000	906.500.000	280.920.000
	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	189.080.000	450.000.000	260.920.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	456.500.000	456.500.000	-
8.	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>1.059.300.000</b>	<b>1.059.300.000</b>	-
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	1.059.300.000	309.600.000	(749.700.000)
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui	-	9.600.000	9.600.000

	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			
	Sub Kegiatan engadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000	300.000.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	759.300.000	-	(759.300.000)
	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	-	749.700.000	749.700.000
	Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	357.000.000	357.000.000
	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	392.700.000	392.700.000



	<b>TOTAL</b>	<b>9.056.383.654</b>	<b>9.875.616.849</b>	<b>819.233.195</b>
--	--------------	----------------------	----------------------	--------------------

*Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024*

### BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

#### 3.1 Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

TABEL 3.1

Perjanjian Kinerja Antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bersama Bupati Rote Ndao.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Mewujudkan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,53 Poin	85,28
		Terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	4,70 %	7,9
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	49,53 Point	49,07
2	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,50 %	1,58
		Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	3,40 %	3,27
		Meningkatnya Kualitas dan Aksebilitas Pelayanan KB, Ketahanan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran	Persentase Perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	100 %	100
			Rasio Aseptor KB	58 %	58

			Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	57,00 %	52,79
			Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)	10 %	18
			Cakupan PUS yang ingin ber – KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5,30 %	6,50
<b>3</b>	Meningkatnya Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan pemenuhan hak – hak perempuan dan anak		Rasio KDRT	0,06%	0,11
		Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Presentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	97 %	97,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	40.199.000	36.034.500	89,64
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	305.000.000	252.763.675	82,87
III	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20.000.000	17.407.000	87,04
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	373.928.000	365.411.000	97,72
V	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	289.399.900	244.989.800	84,65
VI	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.938.179.800	3.645.876.552	73,83
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.175.092.995	1.118.516.380	95,19
VIII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.733.817.154	2.388.690.222	87,38
TOTAL		9.875.616.849	8.069.689.129	81,71

*Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2024*

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Adapun alokasi anggaran, program/kegiatan dan realisasi yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan rincian sebagai berikut :

Pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapat alokasi anggaran **Rp. 9.875.616.849,-** realisasi sebesar **Rp. 8.069.689.129,-** atau **81,71%** dengan rincian :

- Belanja Operasional sebesar **Rp. 9.975.616.849,-** realisasi sebesar **Rp 8.069.689.129,-** atau 81,71%
- Belanja Modal sebesar **Rp. 1.027.499.000,-** realisasi **Rp. 998.298.700,-** atau 97,18%

**Tabel 3.2**

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun Anggaran 2024**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>2.733.817.154</b>	<b>2.388.690.222</b>	<b>87,38</b>
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.360.979.054	2.063.391.972	87,40
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.258.979.054	1.978.011.972	87,56
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	102.000.000	85.380.000	83,71
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	9.600.000	9.600.000	100
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.600.000	9.600.000	100
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.325.600	152.205.850	98,63
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.000	3.455.000	69,17
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	30.000.000	30.000.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.296.600	19.198.450	99,49

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.034.000	99.552.400	99,52
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.474.500	26.736.800	75,37
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	975.000	975.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.499.500	25.761.800	74,67
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	173.438.000	136.755.600	78,85
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.438.000	136.755.600	78,85
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>40.199.000</b>	<b>36.034.500</b>	<b>89,64</b>
8	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota	20.000.000	20.000.000	100
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	20.000.000	20.000.000	100
9	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	20.199.000	16.034.500	79,38
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.199.000	16.034.500	79,38
<b>III</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>305.000.000</b>	<b>252.763.675</b>	<b>82,87</b>
11	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota	65.000.000	60.440.000	92,98

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	60.440.000	92,98
12	Kegiatan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota	188.360.000	140.709.675	74,70
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	188.360.000	140.709.675	74,70
13	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.640.000	51.614.000	99.95
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	51.640.000	51.614.000	99.95
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>17.407.000</b>	<b>87,04</b>
14	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten / kota	20.000.000	17.407.000	87,04
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	17.407.000	87,04
<b>V</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>373.928.000</b>	<b>365.411.000</b>	<b>97,72</b>
15	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	158.728.000	151.416.000	95,39

	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	93.728.000	91.633.500	97,77
	Sub Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Kebijakan Program/Kegiatan Pencegahan KTA	65.000.000	59.782.500	91,97
16	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	150.800.000	149.721.000	99,28
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150.800.000	149.721.000	99,28
17	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.400.000	64.274.000	99,80
	Sub Kegiatan pENINGKATAN kAPASITAS sdm Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penangan bagi AMPK Tingakt Daerah Kab/Kota	64.400.000	64.274.000	99,80
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>289.399.900</b>	<b>244.989.800</b>	<b>84,65</b>
18	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	289.399.900	244.989.800	84,65
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000	59.855.000	99,75
	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	89.400.000	80.880.000	90,47
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	139.999.900	104.254.800	74,47
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>4.938.179.800</b>	<b>3.645.876.552</b>	<b>73,83</b>
19	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1.102.468.800	644.064.052	58,42



	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	226.468.700	100.193.306	44,24
	Sub Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	21.500.000	0	0,00
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	128.500.100	117.635.100	91,54
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	150.000.000	123.821.500	82,55
	Sub Kegiatan Pengolahan Operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	496.000.000	254.139.146	51,24
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	48.275.000	60,34
20	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	886.975.000	871.195.500	98,22
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan Layanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk petugas Keluarga Berencana/penyuluh	499.975.000	487.369.700	97,48
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	387.000.000	383.825.800	99,18
21	Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/kota	2.042.236.000	1.304.864.200	63,89
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000	11.459.000	84,88
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.055.266.000	533.146.200	50,52

	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	541.198.000	515.193.000	95,19
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	15.800.000	4.200.000	26,58
	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	416.472.000	240.866.000	57,83
22	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan kesetaraan ber-KB	906.500.000	825.752.800	91,09
	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	450.000.000	393.039.300	87,34
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	456.500.000	432.713.500	94,79
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>1.175.092.995</b>	<b>1.118.516.380</b>	<b>95,19</b>
23	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.175.092.995	1.118.516.380	95,19
	Sub Kegiatan Pengelolaan ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	9.600.000	0	0,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Akseptor/UPPKA)	326.947.995	321.080.792	98,21
	Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga beresiko Stunting ( termasuk remaja calon pengantin/ calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	377.000.000	371.664.088	98,58
	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga beresiko Stunting ( termasuk remaja calon pengantin/ calon PUS, Ibu	461.545.000	425.771.500	92,25

	Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)			
<b>TOTAL</b>		<b>9.875.616.849</b>	<b>8.069.689.129</b>	<b>81,71</b>

3.3 Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

**Tabel 3.3**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	100%	89,64%	Tidak Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	100%	100%	-	-
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100%	100%	-	-
				<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	100%	79,38%	Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi tidak sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	79,38%	Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi tidak sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	100%	82,87%	-	-
				<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan</b>	100%	92,98%	-	-

				<b>Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	92,98%	-	-
				<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	100%	74,70%	Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi tidak sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	74,70%	Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi tidak sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	99,95%	-	-
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	99,95%	-	-
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	100%	87,04%	Tidak Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam</b>	100%	87,04%	Tidak Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi sesuai Kebutuhan Lapangan	-

				<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>				
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	87,04%	-	-
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	100%	97,72%	Tidak Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	95,39%	Tidak Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak kewenangan Kab/kota	100%	97,77%		
				Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan program/kegiatan pencegahan KTA	100%	91,97%		
				<b>Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi</b>	100%	99,28%		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Layanan AMPK	100%	99,28%		
				<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100%	99,80%		
				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	100%	99,80%		
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	100%	84,65%	-	-

	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
				<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	84,65%	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100%	99,76%	-	-
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100%	90,47%		
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100%	74,47%	Tidak Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi sesuai Kebutuhan Lapangan	
				<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	100%	73,83%	-	-
				<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	100%	58,42%	Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi tidak sesuai Kebutuhan Lapangan	-
				Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	100%	44,24%	Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi tidak sesuai Kebutuhan Lapangan	
				Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	0%	Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi tidak sesuai Kebutuhan Lapangan	
				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100%	91,54%	-	-
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Minilokakarya (Minilok)	100%	82,55%		-

				Pengolahan Operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	100%	51,24%	Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi tidak sesuai Kebutuhan Lapangan	
				Pengendalian Program KKBPK	100%	60,34	Tidak Mengalami Permasalahan dikarenakan Realisasi sesuai Kebutuhan Lapangan	
				<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	100%	98,22%		
				Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana/Penyuluh	100%	97,48%		
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100%	99,18%		
				<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	63,89%	-	-
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	84,88%	-	-
				Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Jangka Panjang (MKJP)	100%	50,52%	Mengalami Masalah karena realisasi tidak sesuai kebutuhan Lapangan	-
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100%	95,19%	-	-
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	26,58%	Mengalami Masalah karena realisasi tidak sesuai kebutuhan Lapangan	

				Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	100%	57,83%		
				<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	100%	91,09%	-	-
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	100%	87,343%		
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	100%	94,79%	-	-
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	100%	95,19%	-	-
				<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	100%	95,19%	-	-
				Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	100%	0,00%	Mengalami Masalah karena realisasi tidak sesuai kebutuhan Lapangan	-
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	100%	98,21%	-	-

3.4 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024.



Semua kegiatan pada program peningkatan pelayanan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 sebagian terlaksana dengan baik tanpa adanya kendala karena rata-rata pencapaian penyerapan realisasi anggaran 81,71% dan sisanya merupakan anggaran yang tidak terpakai sesuai kebutuhan lapangan.

3.5 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Untuk Tahun 2024, Kebijakan Strategis yang Ditetapkan oleh Pj. Bupati Rote Ndao selaku Kepala Daerah tidak ada atau tidak langsung bersentuhan dengan Program Kegiatan untuk Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Rote Ndao.

3.6 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel 3.6

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	CATATAN DPRD KEPADA PEMERINTAH AGAR DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DI DINAS DAPAT DI KELOLA DENGAN SEBAIK MUNGKIN SEHINGGA DI KEMUDIAN HARI TIDAK BERHADAPAN DENGAN MASALAH HUKUM SEPERTI PERSOALAN HILANGNYA UANG JASA MEDIS PELAYANAN KB MKJP (METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG) PADA TAHUN 2023.	Terhadap Rekomendasi DPRD yang terhormat maka Pemerintah melalui Dinas P3AP2KB akan menindak lanjut dengan melakukan pengelolaan anggarannya kedepan secara teliti mengacu pada mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Terhadap tujuan/masalah yang diselesaikan dalam anggaran tahun 2023 ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku. Selanjutnya untuk tujuan pengelolaan anggaran tahun 2024 dan kedepan melalui pengelolaan yang tertib dan teliti sesuai prosedur berdasarkan aturan yang berlaku sehingga pengelolaan anggarannya dapat berjalan dengan baik

#### **BAB IV PENUTUP**

Demikian Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dibuat sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan Anggaran yang diberikan.

Ba'a, 24 Januari 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan  
Anak Pengendalian Penduduk  
Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Rote Ndao,



**Regina A. V. Kedch, S.STP,M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19800827 199912 2 003